



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HASAN ABDULLAH SANYATA
2. Jabatan : KEPALA BALAI BESAR
3. NHK : 630777

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.108.074.000

1. Tanah Seluas 2140 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 361.660.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/41 m2 di KAB / KOTA KOTA BOGOR , HASIL SENDIRI Rp. 514.080.000
3. Tanah Seluas 217 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 81.592.000
4. Tanah Seluas 667 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN Rp. 150.742.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 28.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.400.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA 125 Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000
4. MOTOR, HONDA GL PRO Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 3.900.000
5. MOTOR, HONDA STAR 86 CC Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 245.473.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 272.250.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.653.797.000
III. HUTANG	Rp.	101.945.442
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.551.851.558

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.